

2. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Upaya Peningkatan Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Temanggung

Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung dibangun sarana gedung, saat ini Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik menempati gedung di kompleks perkantoran sebagai tempat pelaksanaan administrasi dan pelayanan permohonan akta-akta catatan sipil, serta Kantor Unit Pelayanan Terpadu.

Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Optimalisasi SDM.
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas tertentu dengan cara menyusun Tim/Pelaksana Teknis.
4. Memperluas pelayanan.
5. Mengadakan pendekatan pelayanan dan memperluas informasi pelayanan jempur bola.
6. Efisiensi dan efektifitas sumber pembiayaan.
7. Memperluas saluran/kelompok sasaran/obyek pelayanan.
8. Adanya Data Base yang valid.

Dengan latar belakang tersebut maka kebijaksanaan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektroni

Temanggung adalah memberikan upaya pelayanan di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk secara cepat, cermat, mudah dan murah.

C. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Temanggung.

Dinamika pembangunan, secara nyata tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala yang ada. Masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja, karena sangat kompleks dan multidimensional.

Apabila dikaji lebih jauh, masalah kependudukan yang dihadapi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka memberikan status kepastian hukum keperdataan kepada setiap orang.

Dalam rangka terciptanya ketertiban dan keamanan, salah satu hal penting adalah administrasi pencatat dan statistik kependudukan yang terus disempurnakan. Tertib administrasi kependudukan dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diharapkan dapat diandalkan.

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, sering dihadapkan pada berbagai kendala, hambatan dan tantangan terutama yang berkaitan dengan kurang tertibnya masalah administrasi kependudukan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Sering terjadi Off-Line dan tuntutan dari penduduk yait

kecelakaan dalam memindahkan data ke komputer

2. Tingkat kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan perubahan data.
3. Kebijakan pemerintah dalam rangka proses pengolahan data kependudukan.
4. Aparat dalam pengertian konfigurasi dari personil, proses dan kelembagaan yang menanganinya.

Hambatan Pelaksanaan Fungsi dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Temanggung secara :

1. Yuridis

Sebelum disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai kependudukan dan catatan sipil. Peraturan satu dengan yang lain sering terjadi tumpang tindih yaitu peraturan yang bersifat parsial atau terpisah antara yang satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda baik oleh petugas maupun masyarakat.

Pencatatan sipil di Indonesia selama ini masih menggunakan aturan jaman kolonial belanda yaitu reglemen pencatatan sipil yang masih mengklasifikasikan masyarakat Indonesia ke dalam kelas-kelas berdasarkan keturunan ras/bangsa dan agama sehingga tidak sesuai lagi dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah se

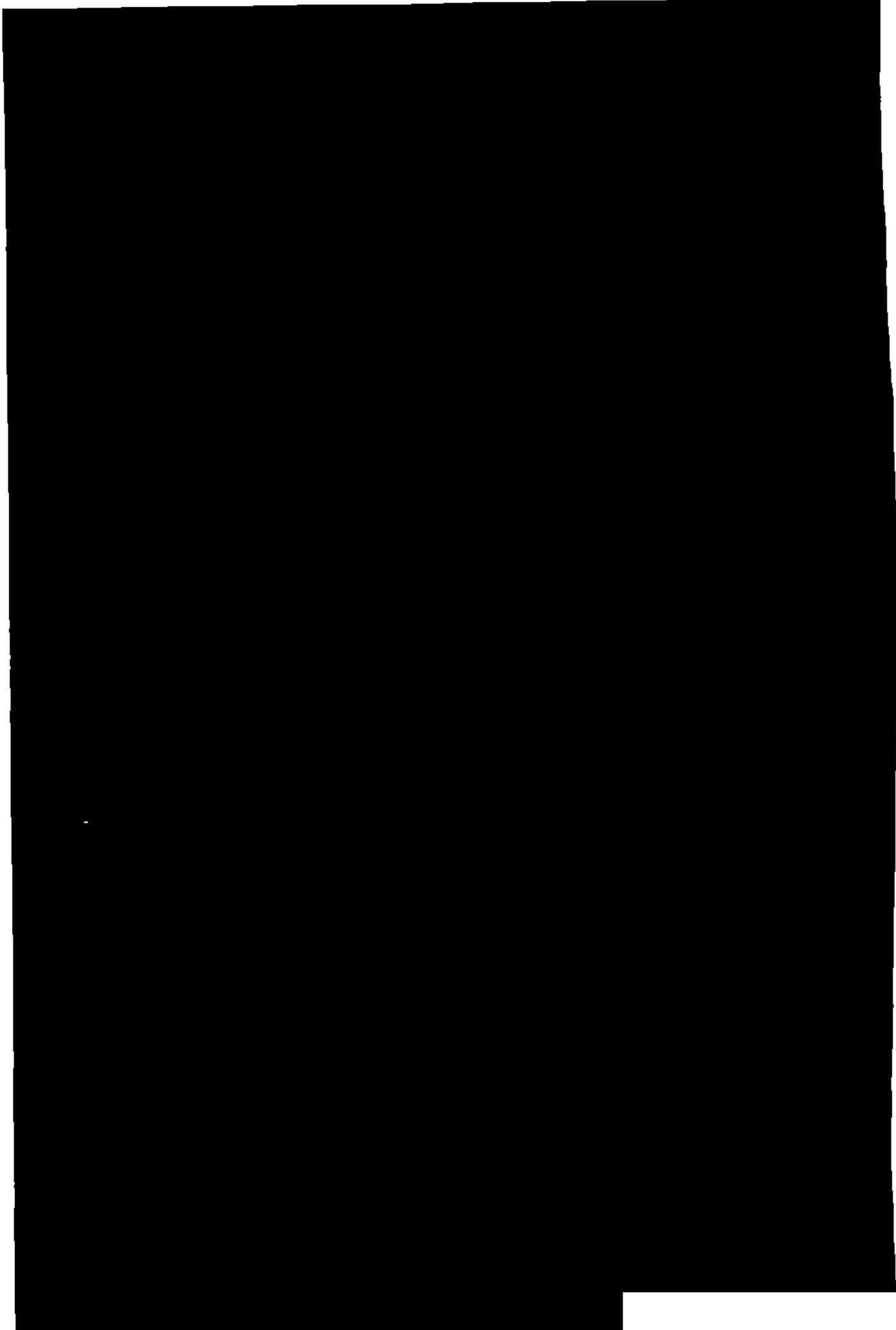
Created with



Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung adalah memberikan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Hambatan Pelaksanaan Fungsi dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kependudukan di Kabupaten Temanggung secara :

a. Yuridis

Sebelum disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada peraturan yang mengatur secara komprehensif mengenai kependudukan dan catatan sipil. Peraturan satu dengan yang lain sering terjadi tumpang tindih yaitu peraturan yang bersifat parsial atau terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda baik oleh petugas maupun masyarakat.

Pencatatan sipil di Indonesia selama ini masih meng

jaman kolonial belanda yaitu reglemen pencatatan s

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengklasifikasikan masyarakat Indonesia ke dalam kelas-kelas berdasarkan keturunan ras/bangsa dan agama sehingga tidak sesuai lagi dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya, sehingga sampai saat ini Kabupaten Temanggung belum dapat melaksanakan Undang-Undang tersebut.

b. Lembaga

Adanya semangat otonomi daerah serta diserahkannya sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1998, memberikan nuansa yang berbeda pada masing-masing kabupaten/kota seIndonesia dalam menginterpretasikan nomenklatur lembaga yang berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan. Di Kabupaten Temanggung nomenklatur lembaga yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik. Nomenklatur tersebut tidak sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 470/0546/2005 tentang Tindak Lanjut Pertemuan Regional Administrasi Penyeragaman nomenklatur Kelembagaan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Nomenklatur yang tidak sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tersebut mengakibatkan kurang terkonsentrasinya penanganan administrasi kependudukan dan catatan sipil secara komprehensif.

c. Aparat

Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai pada lingkungan Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akan tetapi dilihat dari tingkat pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada masih relatif rendah. Hal ini disebabkan kurang minatnya pegawai untuk mempelajari dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Dari segi sumber daya manusia, hendaknya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung :
 - a. Perlu meningkatkan tenaga kualitas maupun kuantitas pelaksana.
 - b. Perlu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya Administrasi Kependudukan baik yang terlihat dari pemanfaatan fungsi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun pelaporan setiap terjadi perubahan oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang bersangkutan lebih dini untuk data yang

2. Diharapkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk serta menjadi Bank Data bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik.
3. Dalam pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, hendaknya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung memerlukan suatu perencanaan yang hati untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Karena perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan organisasi.
4. Untuk dapat mencapai hasil optimal dari tugas yang diemban Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik, pada tahun mendatang sangat berharap adanya alokasi dana dari Pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang penting.